

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai awal untuk menjelaskan penulisan skripsi ini, pada bab pertama ini akan berisikan penjelasan informasi dasar yang akan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini nantinya. Diawali dengan latar belakang masalah dari ancaman-ancaman kawasan yang diterima Jepang, setelah itu rumusan masalah yang dirumuskan untuk ditemukan jawabannya dalam penulisan skripsi ini. Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, perlu ada kerangka pemikiran sebagai alat untuk mendapatkan logika berpikir dan mendapatkan hipotesa. Sebagai penutup pada bab ini akan ada beberapa penjelasan terkait dengan tujuan penelitian, batasan penilian, sampai dengan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini.

A. Latar Belakang Masalah

Hal yang paling penting bagi keberlangsungan sebuah negara, salah satunya adalah sistem pertahanan. Tanpa adanya sistem pertahanan yang kuat, ancaman dari pihak luar akan lebih mudah mengganggu stabilitas negara. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai unsur untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat. Salah satu unsur pertahanan yang penting bagi sebuah negara adalah memiliki industri pertahanan. Industri pertahanan adalah industri nasional (pemerintah maupun swasta) yang produksinya baik secara sendiri maupun kelompok, termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan, atas penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara (Pertahanan, 2009).

Dalam Hubungan Internasional, industri pertahanan bisa mempengaruhi dinamika yang ada pada sistem internasional. Pengembangan industri pertahanan suatu negara bisa diartikan sebagai upaya negara untuk

meningkatkan kapabilitas militernya. Ini berpotensi dalam mempengaruhi situasi politik internasional maupun regional, karena pengembangan industri pertahanan, walaupun tujuannya untuk menopang kebutuhan angkatan bersenjata maupun mengembangkan ekonomi, akan menjadi perhatian bagi negara lain. Keberadaan industri pertahanan pada suatu negara menjadi nilai tawar bagi negara lain dalam merespon suatu isu dan melakukan perundingan internasional.

Jepang merupakan negara yang terletak di kawasan Asia bagian Timur. Negara ini merupakan negara kepulauan yang memiliki luas wilayah mencapai 377.915 km² (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia). Pada periode abad pertengahan, Jepang memimpin sebagai pengeksport senjata terbesar di dunia, dengan memasok senjata baja berkualitas tinggi ke sebagian besar wilayah di Asia, dan mulai memproduksi senjata api. Sepanjang tahun 1950-an dan awal 1960-an Jepang menjadi pengeksport alat militer ke negara-negara termasuk Amerika Serikat, Vietnam Selatan, Indonesia, Brasil, Thailand, Burma, dan Taiwan (Gray, *Japan's Defence Industry: Pacifism, Pragmatism and Necessity*, 2011). Ini membuktikan sejarah industri pertahanan Jepang di masa lalu sudah sangat maju. Akan tetapi, akibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, membawa dampak yang signifikan dalam sistem pertahanan maupun militer Jepang, termasuk dalam industrinya.

Jepang menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak bisa menggunakan kekuatan militernya secara utuh, karena memiliki batasan-batasan yang tercantum dalam pasal 9 konstitusi 1947, berbunyi :

Chapter II

Renunciation Of War

Article 9, Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people

forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

Konstitusi Jepang ini disusun berdasarkan kesepakatan Jepang dengan Amerika Serikat pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Dalam Konstitusi 1947 pasal 9 yang dibuat ditujukan agar Jepang tidak mempunyai potensi untuk dapat memulai perang dengan dilumpuhkannya kekuatan bersenjata Jepang baik darat, laut dan udara serta potensi perang lainnya yang ada pasca perang, dan untuk mencegah penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian/konflik internasional (Ayu, 2015). Terlihat jelas dalam pasal 9 itu menjadikan Jepang sebagai negara passive pacifist atau bisa dikatakan anti-perang. Dengan itu, Jepang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah untuk meningkatkan pertahanan negaranya agar tidak melanggar konstitusi yang ada. Ditengah kondisi keamanan kawasan Asia Timur yang sedang bergejolak, dimana beberapa negara sedang gencar meningkatkan kemampuan militer, sedangkan Jepang memiliki batasan dalam mengembangkan militernya. Hal ini lah yang membuat Jepang khawatir dan merasa keamanan negaranya terancam. Maka dari itu, Jepang merasa perlu mengambil strategi baru untuk meningkatkan pertahananya tanpa harus melanggar konstitusi.

Kondisi politik keamanan Jepang semakin menarik saat Shinzo Abe kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang sejak 2012. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Shinzo Abe dalam arah politik keamanan Jepang yang berfokus pada kekuatan ekonomi dan pertahanan. Dalam NDPG (National Defense Program Guidelines) tahun 2014 yang dibuat dibawah pemerintahan

Shinzo Abe , Jepang pertama kali menyebutkan bahwa secara jelas Tiongkok adalah kekuatan yang potensial menyebabkan destabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Diperkuat dengan kemunculan “Rising China”, yaitu suatu isu tentang kebangkitan Tiongkok baik dalam bidang ekonomi maupun militer yang semakin dominan di kawasan Asia Timur membuat perubahan yang signifikan di kawasan Asia Timur. Kebangkitan Tiongkok mempengaruhi berbagai bidang seperti ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan bagi negara-negara di Asia Timur, termasuk Jepang. Pengaruh dari kebangkitan Tiongkok tidak bisa dihindari oleh Jepang. Meluasnya pengaruh Tiongkok dalam ekonomi dan keamanan dianggap sebagai “ancaman” bagi Jepang. Tiongkok berhasil menggeser posisi Jepang setelah lebih dari 42 tahun menyandang predikat sebagai kekuatan ekonomi dunia nomor dua di dunia pada tahun 2010 (Meryani, 2011).

Semakin meningkatnya perkonomian Tiongkok akan berbanding lurus dengan peningkatan pengaruh politik dan militernya baik di kawasan maupun global. Kekuatan militer yang dimiliki Tiongkok dapat dilihat dari jumlah anggaran belanja militer yang dikeluarkannya yaitu sebesar 250 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 3.564 triliun pada tahun 2018 (Setiawan, 2019). Hal ini membuat Tiongkok menjadi salah satu negara dengan anggaran militer terbesar di dunia. Tiongkok juga meningkatkan kemampuan militer dan aktivitas kelautan yang dilakukan di dekat, di dalam, dan di sekitar wilayah perairan Jepang dianggap sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan perdamaian keamanan bagi pemerintah Jepang (Riyanto, 2012). Selain itu, Jepang memiliki sengketa wilayah bersama Tiongkok terkait kepemilikan Pulau Senkaku. Jepang menganggap Tiongkok dalam penyelesaian sengketa ini semakin asertif. Maka dari itu NDPG Jepang dari tahun 2005 hingga 2018 selalu menyebutkan Tiongkok sebagai ancaman yang potensial dan bisa

mengganggu stabilitas keamanan kawasan.

Kekhawatiran Jepang juga disebabkan oleh negara tetangga lainnya, yaitu Korea Utara yang selalu berambisi untuk mengembangkan Weapons of Mass Destructions (WMD) atau senjata nuklirnya yang membuat stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur ikut terpengaruh. Semenjak Korea Utara mengundurkan diri dari Nuclear Nonproliferation Treaty, Ia melakukan beberapa kali uji coba misil yang pertama kali diluncurkan ke arah Lautan Jepang pada 1993. WMD milik Korea Utara ini menjadi sebuah masalah yang berarti bagi Jepang, karena pada setiap percobaan peluncuran rudal, Korea Utara selalu mengarahkannya ke wilayah Jepang. Pada tahun 1998, Korea Utara meluncurkan percobaan rudal tipe Nodong dengan jarak tempuh 1300 Km dan Taepodong 1 dengan jarak tempuh 1500 Km melewati (diatas) wilayah Jepang dan jatuh di Samudra Pasifik. Korea Utara juga mengembangkan Taepodong 2 dan Nodong yang memiliki jarak tempuh sekitar 3.500-6.000 kilometer (The National Institute for Defense Studies Japan, 2000). Pada tahun 2006, Korea Utara kembali melakukan uji coba dengan meluncurkan 7 rudal tanpa memberi peringatan sebelumnya. Kemudian 6 dari 7 rudal tersebut diluncurkan dari Kittaeryong di perairan selatan Korea Utara dan berhasil mendarat di laut Jepang setelah terbang sejauh 400 kilometer.

Hal yang dilakukan Korea Utara adalah untuk memperlihatkan bahwa Korea Utara memiliki kemampuan untuk menyerang wilayah Jepang. Walaupun Korea Utara tidak menunjukan rudal ini tepat kewilayah Jepang, tetapi Jepang khawatir dan meragukan keakuratan sasaran percobaan rudal tersebut, karena Jepang merasa tingkat teknologi Korea Utara dianggap masih belum canggih sehingga dapat membahayakan wilayah Jepang. Dan rudal ini juga dapat dijadikan teror oleh Korea Utara bagi rakyat sipil (N^o100, 2005). Selain itu Jepang menyatakan bahwa senjata nuklir dan rudal Korea Utara masih tetap

menjadi ancaman yang serius dan nyata bagi keamanan Jepang. Bahkan Korea Utara juga secara signifikan merusak perdamaian dan keamanan kawasan dan komunitas internasional.

Perubahan-perubahan yang telah terjadi dikawasan Asia Timur telah membawa Jepang menjadi negara yang ingin aktif untuk melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam bidang pertahanannya. Selama ini Jepang hanya bersembunyi di balik Amerika Serikat. Sehingga Jepang tidak dapat mandiri dalam bidang militer dan sangat bergantung kepada Amerika Serikat (AS). Peran AS dari awal ditegaskan adalah untuk mengurus ancaman dari luar yang dapat mengganggu keamanan Jepang sedangkan tentara Jepang baik Angkatan Darat (Ground Forces) dan Angkatan Laut (Navy) akan mengurus segala bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri dan juga bencana alam (Riyanto, 2012). Selama ini, hubungan kerjasama keamanan kedua negara ini sangat erat. Jepang bisa mengandalkan AS untuk membantu perlindungan keamanan negaranya, tetapi sekarang pengaruh AS di Asia mulai menghilang khususnya di kawasan Asia Timur. Karena Amerika Serikat memiliki permasalahan di negaranya sendiri dan pengaruh tersebut mulai tergantikan oleh Tiongkok. Maka dari alasan itu, semakin membuat Jepang ingin mengambil strategi pertahanan baru untuk melindungi negaranya sendiri tanpa harus ada ikut campur tangan AS lagi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas dimana Jepang yang merasa terancam terhadap situasi keamanan disekitar kawasannya, maka dapat ditarik rumusan masalah **“Bagaimana strategi pertahanan Jepang melalui industri pertahanan sebagai respon dari ancaman kawasan tahun 2014-2019 ?”**

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Strategi

Menurut seorang ahli kajian strategis dari Amerika Serikat, Colin Gray, mendefinisikan strategi sebagai “*the bridge that relates military power to political purpose,*” (Jembatan yang menghubungkan kekuatan militer dengan tujuan politik). Definisi ini mengartikan bahwa strategi memiliki peran sebagai penghubung antara kekuatan militer sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Gray juga menyatakan bahwa, “*Strategy is neither the use of force itself, nor is it policy, rather it is the bridge that should unite the two,*” (strategi bukanlah penggunaan kekuatan itu sendiri, atau kebijakannya, namun lebih sebagai jembatan yang menghubungkan keduanya). Jadi kajian staregis adalah kajian yang bersifat multidimensional dengan kekuatan militer sebagai intinya dan melibatkan ekonomi, teknologi, organisasi, informasi, bahkan pola perilaku lawan.

Strategi suatu negara tidak selamanya akan bersifat statis, justru akan bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan perubahan faktor domestik maupun internasional yang bisa berubah sewaktu-waktu. Menurut Christopher Layne, perubahan dapat terjadi karena adanya pergeseran asumsi atas berbagai factor seperti anggaran belanja militer atau pertahanan, bantuan luar negeri yang didapat, perilaku dari sebuah aliansi, penyebaran pasukan, hingga aktivitas diplomasi serta pola tindakan sebuah negara terhadap negara lawan (Layne, 1997).

Christopher Layne juga menyebutkan bahwa setiap negara memiliki strategi yang berbeda, namun setaip strateginya melalui proses utama yaitu:

1. Penentuan kepentingan keamanan paling vital bagi negara.
2. Identifikasi ancaman-ancaman terhadap kepentingan tersebut .
3. Penentuan cara terbaik untuk mengarahkan sumber daya secara politik, militer, ekonomi,

dan lainnya yang dapat melindungi kepentingan yang dituju.

Konsep strategi ini sering kali digunakan oleh negara untuk mencapai suatu tujuan negara dalam rangka menghadapi ancaman seperti hal melindungi negara dan bangsanya. Ancaman-ancaman ini dapat berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman yang diterima bisa secara langsung maupun tidak langsung dari negara-negara lain terlebih di sekitar regional negara tersebut. Ancaman ini menjadi sebuah tanggung jawab negara, karena negara berperan sebagai aktor utama yang harus melindungi negara dan bangsanya sendiri. Hal ini berkesinambungan dengan apa yang dialami oleh negara Jepang, dimana saat ini Jepang sedang menghadapi ancaman disekitar kawasan yangmana Lingkungan keamanan di sekitar Jepang menjadi semakin parah, dengan berbagai tantangan dan faktor destabilisasi menjadi lebih nyata dan akut. Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklir dan misil balistiknya, dan telah mengulangi retorika dan perilakunya yang provokatif terhadap Jepang. Dimana Tiongkok telah berkembang pesat dan mengintensifkan kegiatannya di perairan internasional dan wilayah udara termasuk Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Dalam rangka menghadapi ancaman tersebut, maka Jepang harus berhati-hati dan teliti dalam memilih strategi yang tepat untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman tersebut.

2. Konsep Difusi Teknologi

Kemampuan teknologi dalam pertahanan suatu negara sangat berpengaruh terhadap posisi negara tersebut dalam sistem internasional. Apabila kemampuan yang dimiliki negara tersebut dapat menciptakan teknologi dengan kualitas yang tinggi, maka hal tersebut dapat menjadi pusat perhatian negara lain sebagai nilai tawar untuk melakukan interaksi dengan pihak lain. Titik balik dimana teknologi sistem pertahanan negara menjadi sangat penting yaitu ketika terjadi perang dingin antara Uni Soviet

dan Amerika Serikat . Karena perang tersebut dikenal juga sebagai arms race, dimana kedua negara tersebut berlomba dalam meningkatkan kecanggihan teknologi persenjataannya.

Menurut seorang ahli teknologi pertahanan dari India, Amitav Malik dalam bukunya berjudul *Technology and Security in the 21st Century: A Demand-Side Perspective*”, menjelaskan apa itu definisi dari persebaran teknologi atau difusi teknologi :

“Technology diffusion may be defined as the natural spread of technology through every type of technology interaction, whether acquisition, development, transfer, co-production or even intellectual exchange”
(Mallik, 2004, hal. 103)

Dari pendapat Mallik, bisa ditarik kesimpulan bahwa disetiap interaksi seperti akuisisi, transfer, pengembangan, produksi bersama, pertukaran intelektual yang dilakukan aktor internasional baik negara atau non-negara dalam hal persenjataan merupakan bagian dari difusi teknologi.

Berdasarkan perspektif penulis, sejak tahun 2014-2019, Jepang telah melakukan keseluruhan tipe interaksi teknologi yang disebutkan oleh Amitav Malik. Di sektor akuisisi, Jepang telah melakukan dengan pembentukan Acquisition, Technology & Logistic Agency (ATLA). ATLA dibawah langsung oleh Ministry of Defense (MOD), yang dibentuk guna menjamin keunggulan teknologi pertahanan Jepang dan untuk menyediakan peralatan pertahanan superior melalui akuisisi peralatan. Selain itu, penciptaan alutsista yang unggul dapat mengakumulasi kapabilitas teknologi, dan berkontribusi dalam memastikan keunggulan teknologi dan pada akhirnya dapat menjadi sumber daya tawar terhadap negara lain.

Disektor pengembangan sendiri tidak bisa

dilepaskan dengan keterkaitan penelitian di dalamnya, sehingga kegiatan ini lebih dikenal sebagai kegiatan Research and Development (R&D). Peningkatan R&D dilakukan oleh Jepang bersama pihak internasional, hal ini bisa menyatukan teknologi unggul dari masing-masing negara yang ikut berpartisipasi dan juga bisa berbagi biaya R&D serta memperkuat hubungan kerjasama di bidang keamanan antar negara. Untuk menunjang kegiatan R&D, tentu transfer peralatan dan teknologi terjadi di dalamnya.

Transfer peralatan dan teknologi pertahanan ke luar negeri dilakukan Jepang dengan pengawasan ketat oleh ATLA dengan berpatokan pada Tiga Prinsip Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan. Transfer peralatan dan teknologi pertahanan ke luar negeri sebagai bentuk kontribusi pada promosi aktif dari menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui implementasi kerja sama internasional seperti kerja sama perdamaian internasional, bantuan bencana internasional, bantuan kemanusiaan, tanggapan terhadap internasional, terorisme dan pembajakan, serta peningkatan kapasitas untuk negaraberkembang (Japan M. o., Japan's Security Policy, 2014). Transfer semacam itu juga berkontribusi untuk memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan dengan sekutu Jepang, Amerika Serikat, dan juganegara-negara lain. Lebih lanjut, ini berkontribusi untuk memelihara dan meningkatkan produksi pertahanan dan basis teknologi Jepang, dengan demikian hal ini berkontribusi pada peningkatan kemampuan pertahanan Jepang.

Di sisi co-production atau produksi bersama, Jepang memanfaatkan Industri lokal berbasis teknologi dalam ketersediaan bahan baku dan mealakukan produksi bersama. Produksi bersama ini dilakukan Jepang bersama industri lokal, sekaligus sebagai bentuk dukungan untuk

mempromosikan teknologi pertahanan yang mampu diciptakan oleh industri-industri lokal berbasis teknologi. Salah satunya dengan Mitsubishi Heavy Industries (MHI) yang sering ditunjuk sebagai kontraktor utama dalam pengembangan produk teknologi pertahanan Jepang. MHI juga merupakan produsen utama peralatan pertahanan Jepang dan satu-satunya produsen pesawat sayap tetap di Jepang.

Dari segi *intellectual exchange*, Jepang melakukan pendekatan dan pertukaran informasi seputar pengembangan proyek teknologi pertahanan dengan akademisi seperti universitas dan lembaga penelitian milik Jepang. ATLA dan lembaga penelitian dalam negeri, seperti lembaga penelitian dan pengembangan nasional dan universitas telah secara proaktif bekerja dalam kolaborasi penelitian dan pertukaran informasi teknologi untuk memastikan bahwa teknologi sipil canggih diterapkan pada pengembangan teknologi pertahanan (Japan M. o., 2016). Pada tahun 2015, Jepang membuat program untuk mendanai penelitian kompetitif yang disebut “*Innovative Science & Technology Initiative for Security*” untuk menemukan penelitian kreatif yang dilakukan lembaga penelitian, universitas maupun perusahaan. Dan dipilih 9 proyek penelitian dari 109 proyek yang diajukan, karena proyek tersebut secara aktif memanfaatkan teknologi sipil canggih yang sangat penting dalam menjamin keunggulan teknologi pertahanan Jepang.

Keterkaitan dengan konsep strategi di atas, disini Jepang sebagai suatu negara yang berperan penting dalam mengambil suatu kebijakan untuk mencapai tujuan negaranya. Akhirnya, Jepang memutuskan untuk menggunakan strategi pertahanan melalui industrinya dengan mengembangkan teknologinya. Dengan

memaksimalkan difusi teknologi seperti melakukan akuisisi dengan membentuk ATLA, melakukan R&D serta transfer peralatan dan teknologi pertahanan bersama pihak internasional dengan melakukan kerjasama bersama negara-negara maju, melakukan produksi bersama dengan Industri teknologi lokal dalam pengadaan bahan baku, serta melakukan intellectual exchange dengan pihak akademisi seperti lembaga penelitian, universitas, maupun perusahaan.

D. Hipotesa

Dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka dapat memperoleh hipotesa dari inti penulisan ini, antara lain : Strategi Pertahanan Jepang dalam merespon ancaman kawasan adalah dengan mengembangkan modernisasi sistem pertahanan yang tidak melanggar Konstitusi 1947 Pasal 9, yang diimplementasikan dalam pengembangan sistem pertahanan berbasis teknologi dengan:

1. Melakukan Akuisisi Teknologi, dengan terbentuknya Aquicition, Technology & Logistic Agency (ATLA).
2. Melakukan R&D, serta Transfer peralatan dan teknologi pertahanan bersama pihak internasional.
3. Melakukan Produksi Bersama dengan industri teknologi lokal.
4. Melakukan Intellectual Exchange dengan akademisi seperti lembaga penelitian, universitas maupun perusahaan.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui respon Jepang dalam menghadapi ancaman kawasan Asia Timur.
2. Mengetahui perkembangan industri pertahanan Jepang.
3. Menganalisa strategi industri pertahanan Jepang tahun 2014-2019.

F. Batasan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai jangkauan penelitian pada tahun 2014-2019. Setelah terbitnya National Security Strategy (NSS) sebagai pedoman dalam kebijakan keamanan nasional oleh Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2014 yang sebagai langkah awal Jepang memulai mengembangkan industri pertahanannya. Dan kerjasama Industri Pertahanan berbasis teknologi yang dijalin Jepang dengan beberapa negara, akademisi dan industri swasta lokal dari tahun 2014 hingga 2019.

G. Metode Penelitian

Skripsi yang ditulis ini memiliki sifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan studi pustaka sebagai sumber utama penulisan. Data yang akan digunakan merupakan data-data kualitatif yang berasal dari sumber primer maupun sekunder. Studi pustaka dilakukan dengan desk study dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang telah ada sebelumnya, membaca dan menganalisa dokumen dan kumpulan datanya sekunder seperti buku, jurnal, artikel majalah, maupun website. Analisis dari data yang telah diperoleh kemudian akan dilanjutkan dengan deduksi menggunakan teori/konsep yang telah dibahas di dalam kerangka pemikiran guna menjawab pertanyaan penelitian dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya.

H. Sistematika penulisan

Secara umum, penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lain. Sehingga pada akhirnya membentuk satu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penelitian serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam empat bab yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka

pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang situasi keamanan di Asia Timur dan ancaman yang dihadapi oleh Jepang di sekitar kawasan Asia Timur, dan akan menjelaskan sejarah industri pertahanan Jepang.

A. Dinamika Hubungan Keamanan Asia Timur

- 1) Jepang – Tiongkok;
- 2) Jepang – Korea Utara

B. Perkembangan Industri Pertahanan Jepang

- 1) Sejarah Industri Pertahanan Jepang;
- 2) Karakteristik Industri Pertahanan Jepang Dalam Perkembangan Industri Pertahanan

BAB III berisi tentang strategi apa saja yang dilakukan oleh Jepang untuk merespon ancaman kawasan melalui industri pertahanan.

BAB IV merupakan bagian akhir, yang berisikan kesimpulan secara keseluruhan atas penelitian yang dilakukan penulis dalam mengangkat permasalahan yang dikemukakan.